

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA MAKASSAR

Linda Arisanty Razak ⁽¹⁾, Syarthini Indrayani ⁽²⁾
(Universitas Muhammadiyah Makassar)
lindarazak@rocketmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Kota Makassar serta faktor-faktor kendala yang dihadapi pengusaha UMKM dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada SAK ETAP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi pada pengusaha Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) di kota Makassar. Teknik analisis data yang digunakan adalah triangulasi sumber, dan analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan; Pelaku UMKM tidak menerapkan SAK-ETAP dalam menyusun laporan keuangan karena tidak memahami SAK-ETAP. Pelaku UMKM menganggap pencatatan yang dilakukan selama usaha berjalan sudah berjalan efektif serta lebih sederhana. Kendala-kendala pelaku UMKM dalam menerapkan SAK-ETAP yaitu sebagai berikut: kurangnya pengetahuan pelaku UMKM tentang SAK-ETAP, belum adanya tenaga akuntansi yang professional, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, serta belum efektifnya sosialisasi dari pihak yang berkompeten tentang SAK-ETAP. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak para pelaku UMKM agar dapat memperoleh solusi terhadap kendala dalam penerapan SAK ETAP maupun pihak yang berkompeten untuk secara efektif mensosialisasikan penerapan SAK ETAP secara menyeluruh

Kata Kunci : Analisis, UMKM, SAK ETAP

I. PENDAHULUAN

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), akumulasi pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kota Makassar dalam kurun tahun 2012 –

2015 berkisar 2.41% Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pelaku UMKM belum sepenuhnya terlibat secara optimal dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di beberapa daerah.

Patut disayangkan mengingat produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh UMKM di Kota Makassar memiliki kualitas yang cukup tinggi. Salah satu aspek yang membatasi pertumbuhan para pelaku UMKM untuk bersaing dan memasarkan produk unggulannya adalah kurangnya pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan yang handal, akurat dan terukur. Akibatnya para pengusaha UMKM sulit mendapatkan kepercayaan dari pihak kreditur dan investor sebagai penyalur dana untuk pengembangan usahanya.

Terkait kendala tersebut, pada tahun 2009 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mensahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) berlaku efektif per 1 Januari 2011 yang bertujuan untuk memudahkan para pengusaha UMKM dalam menyusun laporan keuangannya. Entitas yang dapat menggunakan standar ini yakni entitas tanpa akuntabilitas publik. Pedoman SAK ETAP mengatur informasi keuangan yang akuntabel sehingga para investor maupun kreditur dapat menilai sistem pencatatan akuntansi untuk melancarkan penyaluran bantuan modal bagi para pengusaha UMKM.

Dengan menganalisis penerapan kebijakan SAK ETAP dalam kurun waktu selama tiga tahun terakhir yang dimulai dari tahun 2014 hingga tahun 2017, diharapkan solusi penyusunan sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan bersifat lebih informatif sehingga meningkatkan kepercayaan dari para investor maupun kreditur demi memaksimalkan permodalan dari Lembaga keuangan khususnya di Kota Makassar. Implementasinya akan dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan bimbingan teknis tentang cara mudah membuat laporan keuangan sederhana.

Berdasarkan fenomena pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana penerapan kebijakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada UMKM di Kota Makassar?

2. Apakah faktor-faktor kendala yang menghambat dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) oleh pelaku UMKM di Kota Makassar?

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan penerapan kebijakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) oleh pelaku UMKM di Kota Makassar?
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) oleh pelaku UMKM di Kota Makassar?

II. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)

Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 17 Juli 2009 telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan telah disahkan oleh DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia). SAK ETAP berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2011.

Alasan IAI menerbitkan standar ini adalah untuk mempermudah perusahaan kecil dan menengah (yang jumlahnya hampir 90% dari total perusahaan di Indonesia) dalam menyusun laporan keuangan mereka. Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP maka Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk

tujuan umum (*general* adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK ETAP bertujuan untuk diimplementasikan pada entitas tanpa akuntabilitas publik. Pada umumnya, UMKM adalah entitas tanpa akuntabilitas publik karena UMKM pada umumnya belum memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) (IAI:2009).

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika: entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, Pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Pengertian Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP

Laporan Keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penejelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (IAI:2009).

Laporan keuangan disusun memiliki tujuan untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomi, informasi akuntansi yang berkualitas harus menunjukkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk menyajikan informasi tersebut, yang mana suatu informasi akuntansi yang berkualitas jika para pengguna laporan keuangan berdasarkan pemahaman dan pengetahuannya masing-masing dapat mengerti dan menggunakan informasi akuntansi yang disajikan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Ada 4 karakteristik kualitatif pokok dari laporan keuangan yaitu ;

1. Dapat dipahami

2. Relevan
3. Andal
4. Dapat dibandingkan

Penyajian Laporan Keuangan SAK ETAP

Penyajian laporan keuangan menurut PSAK no. 1 tentang penyajian laporan keuangan yaitu : “ suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan Laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

SAK ETAP memiliki 30 bab sejumlah 182 lembar yang terdiri dari ruang lingkup, konsep dan prinsip prevasif, penyajian laporan keuangan, Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan catatan atas laporan keuangan. Di dalamnya mencakup juga standar, pelaporan akuntansi untuk masing-masing akun selanjutnya SAK UMUM.

Usaha Mikro Kecil Menengah

Bentuk UMKM dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, seperti misalnya firma dan CV, maupun perseroan terbatas. UMKM dapat dikategorikan menjadi tiga terutama berdasar jumlah aset dan omzet sebagaimana tercantum di Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut:

1. Usaha Mikro : Usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Aset \leq Rp50.000.000,00 Memiliki kekayaan bersih kurang dari atau sama dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - b. Omzet \leq Rp300.000.000,00 Memiliki hasil penjualan tahunan kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
2. Usaha Kecil : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. $Rp50.000.000,00 < \text{Aset} \leq Rp500.000.000,00$

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau

b. $Rp300.000.000,00 < \text{Omzet} \leq 2.500.000.000,00$

Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. $Rp500.000.000,00 < \text{Aset} \leq Rp10.000.000.000,00$

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. $Rp2.500.000.000,00 < \text{Omzet} \leq Rp50.000.000.000,00$

Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

III.METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di Kota Makassar pada para Pengusaha UMKM di Kota Makassar.

Jenis dan Fokus Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peranan kebijakan SAK ETAP pada UMKM di Kota Makassar
2. Mengidentifikasi beberapa faktor yang menghambat bagi UMKM dalam penerapan kebijakan SAK ETAP di Kota Makassar

Model / Rancangan Penelitian

Model/rancangan Penelitian ini meliputi: 1) Menganalisis Deskripsi Pedoman kebijakan SAK ETAP. 2) Mengidentifikasi pelaku UMKM yang menerapkan kebijakan SAK ETAP. 3) Menyusun pedoman wawancara terhadap responden dan instansi terkait dan 4) Merumuskan hasil evaluasi penerapan kebijakan SAK ETAP berdasarkan hasil analisis dan wawancara di lapangan.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Data penelitian akan berupa hasil wawancara terhadap pengusaha UMKM. Proses wawancara dilakukan peneliti dengan menggunakan *depth interview* dengan respondennya adalah para pengusaha UMKM di Kota Makassar. Hasil wawancara dan observasi menggunakan Teknik purposive sampling dan snowball sampling, dimana sampel yang diambil tidak ditekankan pada jumlah melainkan pada kedalaman informasi dari sampel sebagai sumber data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari aktivitas akuntansi. Laporan ini mengiktisarkan data transaksi dalam bentuk yang berguna bagi pengambilan keputusan. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pelaku UMKM di Kota Makassar menunjukkan bahwa pemahaman SAK-

ETAP masih rendah. Sebagian besar pelaku UMKM mengaku tidak memahami dan tidak mengetahui secara langsung dari pihak yang berwenang tentang SAK-ETAP serta belum adanya pemahaman terhadap pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ilmu akuntansi. Hal itu disebabkan, sebagai berikut:

1. Pendidikan para pelaku UMKM hampir sebagian besar masih relatif rendah.

Pelaku UMKM memiliki pendidikan yang relatif rendah. Pelaku UMKM sebagian besar hanya lulusan SMP dan SMA, sehingga pelaku UMKM tidak mengetahui ilmu akuntansi yang baik dan benar. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh para pelaku UMKM masih sebatas pengeluaran dana masuk maupun dana keluar dan masih tergolong sederhana.

2. Pelaku UMKM tidak memahami pentingnya pencatatan dan penyusunan laporan keuangan,

Sebagian besar dari pelaku UMKM tidak menganggap penting pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Dan Sebagian besar pelaku UMKM mengaku melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan terlalu rumit dan menyita waktu. Pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sangat penting dilakukan, karena pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Posisi dan kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan sebagai pantauan perusahaan dalam memperkirakan perkembangan perusahaan. Pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang akurat dan relevan dapat digunakan sebagai informasi kepada pihak internal maupun pihak eksternal tentang pengelolaan dan perkembangan perusahaan.

3. Kurang efektifnya sosialisasi dari pihak yang berwenang tentang SAK-ETAP.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pelaku UMKM di Kota Makassar menunjukkan bahwa sebagian besar mengaku tidak

mendapatkan sosialisasi dari pihak yang berwenang tentang SAK-ETAP, sehingga pemahaman pelaku UMKM tentang SAK-ETAP masih sangat rendah

Pencatatan dan Penyusunan Laporan Keuangan SAK ETAP

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan terhadap Pelaku UMKM di Kota Makassar menunjukkan bahwa sebagian besar tidak melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Namun, beberapa pelaku UMKM mengaku melakukan pencatatan keuangan yang sederhana sesuai dengan kebutuhan usahanya.

Sebagian besar pelaku UMKM mengaku tidak melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Mereka menggunakan bukti transaksi sebagai dokumen keuangan. Bukti transaksi yang digunakan disusun sendiri sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan dari pengusahaan UMKM. Bukti transaksi yang digunakan yaitu nota atau *invoice*, dan Bukti tanda terima barang.

Bukti transaksi tersebut juga digunakan untuk menghitung laba perusahaan. Laba perusahaan dihitung dengan menjumlah semua penjualan yang ada pada arsip nota kemudian dikurangi dengan bukti transaksi dari pengeluaran. Dari hal tersebut, maka pelaku UMKM akan mengetahui laba perusahaan. Namun demikian, pelaku UMKM tidak menghitung laba perusahaan secara rutin, karena pelaku UMKM tidak terlalu mementingkan perhitungan laba sehingga sebagian besar pelaku UMKM kesulitan dalam memberikan informasi jumlah laba perusahaan.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi hanya ada beberapa pelaku UMKM yang melakukan pencatatan keuangan yang sesuai dengan pemahaman dan. Pencatatan yang dilakukan bersumber dari bukti transaksi. Pencatatan yang dilakukan yaitu formulir kas mingguan, formulir penjualan, formulir piutang, formulir utang, dan formulir gaji karyawan. Formulir-formulir tersebut dibuat sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan pelaku UMKM. Penyusunan formulir tidak berdasarkan ilmu akuntansi, tetapi hanya sebatas pengetahuan pelaku UMKM.

Pencatatan yang dilakukan pelaku UMKM diketahui masih belum sesuai dengan ilmu akuntansi, karena pencatatan yang dilakukan tidak menunjukkan tahap-tahap seperti yang ada pada siklus akuntansi dan pencatatan hanya dapat dipahami oleh pelaku UMKM itu sendiri. Pencatatan keuangan seharusnya dapat memberikan informasi kepada pihak eksternal tentang informasi keuangan perusahaan, sehingga pencatatan harus memiliki karakteristik mudah dipahami, relevan, dan akurat.

Pencatatan yang dilakukan pelaku UMKM juga tidak menunjukkan hasil yang akurat, karena pencatatan tidak dilakukan secara rutin dan keuangan perusahaan masih bercampur dengan keuangan pribadi. Terkait dengan pencatatan yang tidak dilakukan secara rutin, pelaku UMKM mengaku tidak sempat melakukan pencatatan yang secara runtut karena mengelola perusahaan sendiri tidak memiliki tenaga kerja untuk melakukan pencatatan keuangan per-usahaan. Sedangkan, terkait dengan keuangan perusahaan yang bercampur dengan keuangan pribadi, sehingga hampir sebagian besar mereka mengaku keuangan perusahaan masih bercampur dengan keuangan pribadi. Hal tersebut terjadi, ketika mereka menerima pendapatan maka keuangan segera dibelanjakan kebutuhan pribadi dan kebutuhan perusahaan tanpa diperhitungkan terlebih dahulu.

Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK-ETAP

Laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-ETAP terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca.

1. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan salah satu laporan keuangan dalam SAK-ETAP. Laporan laba rugi menurut SAK-ETAP (2009) menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode. Laporan laba rugi memasukkan semua pos pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu periode. Sebagian besar pelaku UMKM tidak menyusun laporan laba rugi secara akurat karena ada beberapa biaya yang tidak dihitung secara akurat dan masih banyak memasukkan biaya-biaya yang bersifat pribadi dari pemilik UMKM.

2. Laporan Perubahan Modal / laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menurut SAK-ETAP (2009) menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut. Hampir semua pelaku UMKM tidak menyusun laporan perubahan ekuitas yang sesuai dengan SAK-ETAP. Pelaku UMKM juga tidak menyusun laporan perubahan ekuitas sesuai pemahaman masing-masing dan tidak memperhitungkan modal akhir pada setiap periode.

3. Neraca

Neraca menurut SAK-ETAP (2009) menyajikan asset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu sampai akhir periode penyusunan laporan. Pelaku UMKM tidak menyusun neraca keuangan. Pelaku UMKM tidak memperhitungkan aset dan kewajiban secara lebih jelas dan akurat. Sebagian besar pelaku UMKM tidak memperhitungkan harta kekayaan yang dimiliki. Pelaku UMKM juga tidak memperhitungkan kewajiban dan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Perhitungan yang dilakukan lebih sederhana dan tidak disusun secara jelas, sehingga dengan begitu dapat diketahui bahwa pelaku UMKM tidak menerapkan SAK-ETAP.

Penerapan SAK-ETAP pada pencatatan dan penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan yang sangat bermanfaat dalam mengambil keputusan ekonomi, karena penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada SAK-ETAP memiliki karakteristik, yaitu mudah dipahami, relevan, materialistis, dapat diandalkan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, dan keseimbangan antara biaya dan manfaat. Dengan demikian, menyusun laporan keuangan yang mengacu pada SAK-ETAP dapat mengetahui posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, sehingga perusahaan dapat mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan perusahaan dengan mempelajari laporan keuangan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penerapan SAK-ETAP

Pelaku UMKM tidak melakukan pencatatan atau pembukuan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-ETAP didasari

pada beberapa alasan, yaitu:

- a. Kurangnya pengetahuan pelaku UMKM tentang SAK-ETAP. Pelaku UMKM melakukan pencatatan atau pembukuan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan pengetahuan dan kebutuhannya masing-masing.
- b. Belum adanya tenaga akuntansi yang profesional pada pelaku UMKM. Pelaku UMKM mengaku tidak mempunyai tenaga akuntansi yang dapat mewakili pemilik dalam melakukan pencatatan atau pembukuan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-ETAP. Hal itu dikarenakan mereka belum berani menyewa tenaga akuntansi untuk sekedar melakukan pencatatan atau pembukuan dan penyusunan laporan keuangan.
- c. Sebagian besar pelaku UMKM mengaku tidak menganggap bahwa laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP tidak begitu penting

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pemahaman pelaku UMKM tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) masih rendah.
2. Pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan pelaku UMKM hanya sebatas laporan bisnis yang dibuat sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masing-masing pelaku UMKM dan Pencatatan yang dilakukan tidak sesuai dengan siklus akuntansi
3. Pelaku UMKM tidak menerapkan SAK-ETAP dalam menyusun laporan keuangan, karena pelaku UMKM kurang memahami SAK-ETAP. Pelaku UMKM menganggap pencatatan yang dilakukan sudah jelas dan efektif.
4. Kendala-kendala pelaku UMKM dalam menerapkan SAK-ETAP, sebagai berikut: kurangnya pengetahuan pelaku UMKM tentang SAK-ETAP, belum adanya tenaga akuntansi yang professional, kurang memahami pentingnya pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, dan kurang efektifnya sosialisasi dari pihak yang berkompeten tentang SAK-ETAP.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan implikasinya, maka penulis mengajukan saran bagi sebagai berikut :

1. Pelaku UMKM hendaknya melakukan pencatatan atau pembukuan keuangan yang sesuai dengan SAK-ETAP untuk mengelola keuangan perusahaan, agar dapat mengetahui kinerja dan posisi keuangan perusahaan dengan lebih akurat dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi perusahaan.
2. Pelaku UMKM hendaknya memisahkan antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi/keluarga, agar laba perusahaan dapat lebih jelas dihitung sehingga mengetahui kinerja perusahaan selama perusahaan berdiri.
3. Perlu adanya sosialisasi mengenai SAK-ETAP dari pihak-pihak yang terkait agar dapat merumuskan strategi dan mensosialisasikan kebijakan SAK ETAP demi meningkatkan pertumbuhan UMKM di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No, 1 Revisi 2009*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.

Nawawi dan Martini. 2004. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

www.BPS.go.id